
**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP AKSESIBILITAS LAYANAN
PERPUSTAKAAN DI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Reni Zainuddin¹, Faridah², Sumarlin Mus³

Universitas Negeri Makassar^{1,2,3}

renizainuddin2@gmail.com¹, faridah@unm.ac.id², ojs3@unm.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang dinamika sistem sosial politik di Jambi setelah berakhirnya kesultanan Melayu Jambi pada tahun 1906 dan masuknya kekuasaan Hindia Belanda melalui sistem keresidenan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam beberapa aspek serta respon masyarakat dalam perubahan yang dilakukan Belanda. Metode yang digunakan adalah metode Sejarah yang meliputi Heuristik, Kritik sumber, Interpretasi, dan Historiografi didukung dengan studi literatur dari berbagai Jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya transformasi yang besar dalam sistem pemerintahan yang bersifat Monarki Hereditas menuju sistem yang dibentuk oleh Belanda yang membuat banyak aspek mengalami pergantian digantikan oleh struktur yang dibentuk oleh Belanda. Dalam perubahan ini membuat Masyarakat Melayu Jambi menunjukkan akan dinamika melalui proses adaptasi dan resistensi yang terjadi di masyarakat dilihat dari akan keterlibatan elit lokal dalam pemerintahan Belanda dengan menyesuaikan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat dengan munculnya resistensi akibat adanya perlawanan secara terbuka atau tertutup dalam mempertahankan budaya dan identitas masyarakat Melayu Jambi.

Kata Kunci: Jambi, Sistem Sosial Politik, Kolonialisme, Keresidenan, Perubahan Sosial.

ABSTRACT

This study examines the dynamics of the socio-political system in Jambi after the end of the Jambi Malay Sultanate in 1906 and the entry of the Dutch East Indies empire through a residency system. The aim of this study is to analyze the changes that occurred in several aspects and the community's response to the changes made by the Dutch. The method used is the Historical method, which includes Heuristics, Source Criticism, Interpretation, and Historiography, supported by literature studies from various journals. The results of the study indicate a major transformation in the government system from a Hereditary Monarchy to a system established by the Dutch, causing many aspects to shift and be replaced by a structure established by the Dutch. In this change, the Jambi Malay community exhibits dynamics through the processes of adaptation and resistance that occur in society, seen from the involvement of local elites in the Dutch government, adapting the community to policies that

have been made, with the emergence of resistance due to open or covert resistance in maintaining the culture and identity of the Jambi Malay community.

Keywords: *Jambi, Socio-Political System, Colonialism, Residency, Social Change.*

A. PENDAHULUAN

Jambi merupakan wilayah yang menjadi kekuasaan Belanda pada masa keresidenan. Keresidenan yang dimaksud merupakan dimana suatu wilayah atau daerah yang administrasi di pimpin oleh residen yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa Belanda. Sebelum wilayah ini dijadikan Keresidenan, daerah ini dikenal sebagai Kesultanan Melayu yaitu tepat di tahun 1615 – 1606. Dalam Naskah Sajarah Kerajaan Jambi karya Ngabehi Sutho Diligo Priyayi 1317 dicantumkan bahwa Kerajaan Jambi dibawah kepemimpinan seorang Raja Bernama Si Pahit Lidah, lalu digantikan oleh seorang yang berbangsa Hindu Bernama Tan Talani. Beliau berasal dari Kerajaan Mataram yang begitu dekat dengan Raja Mataram dimasa itu. Pada saat beliau diangkat sebagai raja, beliau memimpin wilayah ujung Jabung hingga Tanjung Jabung. Setelah masa kepemimpinannya beliau wafat tepat di tahun 1460, sehingga di gantikan oleh Putri Laras Pinang Masak. Di kepemimpinannya beliau menikah dengan datuk Paduko Berhala yang bersal dari keturunan Turki serta beragama Islam. Kemudian mereka memiliki seorang anak laki-laki dan diberi nama Orang Kayo Hitam dan anak tersebut diangkat sebagai Pemimpin Umat Islam hingga tahun 1515.

Setelah habis masa kepemimpinan Orang Kayo Hitam, maka diangkatlah Pangeran Hilang Deak sebagai raja Jambi, pangeran tersebut Adalah anak dari Orang Kayo Hitam. Pangeran tersebut memimpin wilayah Jambi pada tahun 1515 hingga 1560. Setelah beliau wafat kepemimpinannya di geser ke Penambahan Renggas Pandak, beliau tersebut Adalah anak dari Pangeran Hilang Deak sebelumnya. Selanjutnya Raja Penambahan Renggas Pandak ini memiliki keturunan seorang laki-laki yang bernama Penambahan Kota Baru dan diangkat menjadi Sultan Melayu Jambi di tahun 1627-1636. Setelah beliau wafat lalu digantikan oleh anaknya sendiri yang memiliki gelar Sultan Abdul Jalil hingga beliau meninggal dunia lalu kepemimpinannya digantikan oleh anaknya sendiri yang bernama Sultan Abdul Muhyi.

Pada Kepemimpinan Sultan Abdul Muhyi, beliau memiliki dua putra dengan nama Pangeran Depati dan Pangeran Ratu. Ketika Pangeran Depati ingin diangkat sebagai pemimpin beliau berniat membunuh putra keduanya, namun rencana tersebut gagal dikarenakan Pangeran

Depati mengetahui rencana tersebut sehingga selisih tersebut menyebabkan Pangeran Depati kabur ke perahu wilanda dan menjadi Raja di wilayah wilanda. Disisi lain Pangeran Ratu, diangkat sebagai Sultan Muara Tebo, sehingga di wilayah melayu Jambi, berdirilah dua Raja namun berbeda wilayah. Pangeran Depati dan Pangeran Ratu memimpin selama 30 tahun lamanya. Kemudian kedua pangeran tersebut meninggal, lalu kepemimpinannya digantikan oleh anak dari Pangeran Ratu yang bernama Sultan Muhammad Syah. Pada saat beliau memimpin, Masyarakat Jambi banyak yang tidak menyetujui Sultan Muhammad Syah sebagai Raja dikarenakan selisih antara pangeran depati dan Pangeran Ratu dengan Sultan Abdul Muhyi. Masyarakat Jambi menyebut bahwa kedua pangeran tersebut durhaka khususnya pangeran Depati karena beliau melarikan diri ke Masyarakat wilanda, maka kepemimpinan digantikan oleh Sultan Istirah Inggo Logo sepupu dari pangeran Depati. Seiring bergantinya kepemimpinan yang bersifat turun temurun hingga kepemimpinan Sultan Thaha Syafuddin 1816-1904.

Dari pembahasan diatas menunjukkan masa kepemimpinan Melayu Jambi menunjukkan bahwa kepemimpinannya di kenal dengan Monarki Herediter yang diartikan dengan sebuah kepemimpinan yang memiliki pemimpin secara turun-temurun. Maka dari itu tulisan ini akan membahas tentang perubahan struktur atau sistem sosial politik di daerah Jambi setelah berakhirnya kesultanan Melayu Jambi. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian ini dengan “Dinamika Sistem Sosial Politik Jambi Setelah Berakhirnya Kesultanan Melayu Jambi 1906”.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penulisan Sejarah yaitu Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi. Metode Heuristik adalah sebuah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode Kritik Sumber adalah sebuah metode dengan menguji keaslian sumber-sumber yang telah di kumpulkan dari heuristic sebelumnya, apakah sumber tersebut asli atau tidak. Selanjutnya metode Interpretasi adalah metode yang digunakan dalam menganalisis sumber-sumber yang telah di uji sebelumnya lalu tahapan akhir yaitu metode Historiografi yang merupakan sebuah penulisan ulang Sejarah setelah melewati ketiga metode sebelumnya.

Selain itu tulisan ini juga menggunakan metode bantuan yaitu studi literatur dengan mencari sumber-sumber dari artikel, junal, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan topik diatas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Sistem Sosial Kesultanan Ke Residenan Belanda

Pendorong kedatangan Belanda di Jambi dikarenakan mempunyai misi politik yaitu untuk menguasai wilayah Jambi dengan berniat menduduki dan mengeksploitasi semua hasil bumi secara besar-besaran. Belanda membentuk sebuah organisasi yaitu VOC ditahun 1602, kemudian organisasi ini mulai melakukan ekspedisi mencari rempah-rempah di pelabuhan Jepara hingga menelusuri pelabuhan di wilayah Jambi bertepatan dengan runtuhnya kekuasaan Majapahit dan terjadi juga sebuah perubahan bagi para raja di melayu Jambi. Dimana menghapus gelar-gelar para pemimpin sebelumnya.

Pada masa itu sitem sosial kesultanan melayu Jambi masih di pegang teguh oleh sistem pemerintahan Sultan sebagai kepala negara, raja dipilih melalui proses seleksi utama yaitu Keraton, Kedipan, Perban dan Raja Empat Puluh. Sistem ini menunjukkan bahwa politik tradisional melayu memiliki mekanisme yang mengawasi atau mengimbangi dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan pada masa itu. Dahulu keturunan Raja masih dalam pengawasan penasehat atau bisa dikatakan pengawal. Dalam segi kependudukan masyarakat Jambi termaksud suatu keadaan dan kelompok yang terdiri dari berbagai macam unsur, komponen, atau karakteristik yang tidak serupa atau beragam

Setelah berakhirnya Kesultanan melayu Jambi, Belanda berhasil mengambil alih kekuasaan kesultanan melayu Jambi, sehingga membuat wilayah Jambi berubah menjadi sebuah keresidenan yang masuk ke dalam wilayah Nenderlance Indiens. Adapun residen pertama di wilayah Jambi yang menjabat yaitu O.L Helfrich di tahun 1906. Pada keresidenan ini Jambi mulai mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan yang mana sistemnya yaitu dengan pemerintahan marga, pemerintahan marga ini terdiri dari beberapa dusun. Pada pembentukan marga, bangsa Belanda mengambil alih sebuah undang-undang Simbur Cahayo atau disebut dengan Undang-undang Adat Palembang.

Belanda berhasil menghapus gelar-gelar orang yang pernah berkuasa selama pemeritahan kesultanan Jambi, dikarenakan bangsa belanda takut akan gelar tersebut dapat membangkitkan perlawanan terhadap kolonial Belanda tersebut. Dalam keresidenan ini

terbentuklah beberapa marga yaitu marga Jujuhan, marga Bilangan, marga Tanah Sepenggal, marga Batin III Ulu, marga Batin III ilir, marga batin II, marga Batin VII dan marga Pelepat. Marga-marga ini dibentuk dengan tujuan untuk mengubah sistem pemerintahan yang diterapkan Belanda, namun marga tersebut tidak berhasil ketingkat dusun. Sebagian wilayah Jambi masih menggunakan pemimpin sistem pemerintah kesultanan Melayu sebelumnya tepatnya wilayah Muaro Bungo.

Sistem politik di Jambi pada masa tradisional dimulai dari dinamika ekonomi, awalnya hadirnya perdagangan dari luar, setelah itu adanya perubahan struktur pemerintahan tradisional dan perdagangan. Dimasa Kesultanan Jambi mengalami banyak tantangan untuk mempertahankan legitimasi dan otoritas tradisional. Di sisi lain kekuatan Belanda semakin mendalam dalam menuntut diplomasi dari Kesultanan Jambi.

Dahulu Kesultanan Jambi bersifat politik dengan berdagang diseluruh aliran sungai Batanghari yang membuat kesultanan ini menjadi tempat paling berpengaruh untuk berdagangan utama yaitu perdagangan lada yang sangat di cari oleh belanda dari perdagangan ini menjadi salah satu keadaannya yang meningkatkan akan keterlibatan belanda dalam sistem politik di kesultanan jambi. Sistem politik kesultanan melayu pada masa itu sebelum adanya belanda masih menggunakan raja sebagai kepala negara dengan didukung oleh pangeran ratu dan rapat dua belas. Dari buku Sejarah Kebangkitan Nasional Dearah Jambi (1978/1979) menurut R.Sahaabuddin (1954) bahwa pemerintahan di pusat kesultanan jambi dipimpin oleh sultan dengan dibantu oleh pangeran ratu atau pangeran mahkota yang dipimpin rapat dua belas.

Pada akhirnya pada tahun 1906 kesultanan melayu mengalami keruntuhan yang disebabkan berapa factor yang membuat kesultanan ini runtuh yaitu terjadinya perselisihan antara kerajaan johor yang dimana dari perselisihan ini membuat melemahnya perlabuhan akan lada dan juga akan perencanaan belanda dalam politik kesultanan pada saat itu yang dimana belanda tidak terima bahwa kesultanan menolak akan perjanjian yang telah di berikan oleh Belanda. Dari sini membuat belanda melancarkan serangan terhadap kesultanan yang pada akhirnya menguasai kesultanan yang pada akhirnya belanda berhasil menduduki jambi dan membentuk sebuah sistem pemerintahan baru yaitu dengan menjadikan jambi menjadi keresidenan menggantikan sistem pemerintahan kesultanan pada tahun 1906.

Dari perubahan akan sistem politik yang dilakukan belanda merubah sistem pemerintah di jambi hingga saat ini yang dimana sistem politik yang dianut dalam politik adalah liberal dan etis sedangkan sistem ekonomi terjadi perubahan yang sangat jelas pada awalnya dengan berdagang menjadi berkebun kemudian dalam sosial budaya terjadi perubahan dengan adanya sistem kasta dan agama yang dianut. Setelah belanda menetap di Nusantara belanda telah menerapkan kebijakan di setiap kedudukannya di Nusantara diantaranya desentralisasi, birokrasi dan feodalistis yang dalam pemerintahan kekuasaan belanda memiliki dasar-dasar undang-undang yaitu undang-undang dasar kerajaan belanda.

Pada tahun 1906 jambi resmi menjadi keresidenan di bawah kekuasaan belanda dengan kebijakan yaitu dengan menyatukan hukum Masyarakat sesuai dengan wilayah keresidenan. Perubahan yang terlintas dalam sistem politik dalam tata pemerintahan yang dimana masa kesultanan pemerintahan dilakukan secara dipimpin oleh sultan, jenang, batin, penghulu, tuotuo dan tengganai. Sedangkan dalam struktur keresidenan yaitu residen, konteler (kepala wilayah), demang (kepala distrik), asiaten demang (kepala kecamatan), dan kepala adat struktur ini dibuat untuk bisa mengatur wilayah dengan menghasilkan keuntungan kepada belanda dengan menggunakan birokrasi dan feodalisme yang menjadi salah satu dalam menghasilkan kepentingan belanda. Belanda memiliki asas pemerintahan yang dimana ingin mempersatukan Masyarakat hukum dengan menghubungkan dengan beberapa daerah kecil yang memiliki hukum dan berdasarkan tempat tinggal Masyarakat hukum tersebut.

Keresidenan pada tahun 1906 sampai 1920 di jambi pada masa itu dipimpin oleh 5 pemuda yang belum berpengalaman yang mengakibatkan reorganisasi pemerintah selanjutnya menerapkan sistem onderafdeeling pada tahun 1908 dari sistem ini mulai mengalami perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan secara merata tetapi terjadi gejolak pada Masyarakat akibat belanda telah mendapatkan otonom. Dalam sistem onderafdeeling terbagi menjadi 3 distrik dengan membentuk perorganisasian dengan memiliki 138.539 jiwa dalam pemerintahan keresidenan. Tahun 1906 Jambi menjadi keresidenan sendiri dengan keputusan kerajaan belanda ditetapkan pemerintahan langsung berdasarkan indische staatsblad 1906 no 187 yang berbunyi daerah Jambi dan kerinci di persatukan menjadi keresidenan tersendiri.⁸ Dengan ibukota Jambi. residen yang pertama yang menjabat yaitu O.L.Helfich. keresidenan Jambi di bagi menjadi dalam 7 afdeeling antara lain: Jambi, muara Jambi, tembesi, muara bungo, muara tebo, bangko, sarolangun, dan kerinci.

Keresidenan Dalam Perubahan Sistem Hukum Melayu Jambi

Perubahan sistem hukum melayu jambi pada masa penerapan sistem keresidenan memiliki dampak setelah berakhirnya kesultanan melayu jambi pada tahun 1906 pada itu hukum di melayu jambi masih berdasarkan pada hukum adat melayu yang bercampur dengan hukum islam dimana sultan dan penghulun adat memiliki kekuasaan untuk berbagai masalah yang terjadi di Masyarakat yang dimana hukum adat berfungsi sebagai aturan sosial yang ada di masyarakat yang mengatur moral dalam hubungan individu dan kelompok. Tetapi setelah diterapkan keresidenan terjadi perubahan yang menuju kepada sistem hukum belanda yang lebih berpusat dan teratur.

Dalam sistem keresidenan pemerintah belanda memperkenalkan dualisme yaitu keberadaan hukum adat tetapi diakui secara terbatas dan juga hukum belanda yang memiliki kekuasaan yang tinggi dalam pemerintahan, ekonomi, dan administrasi. Yang dimana hukum belanda ini diterapkan dalam Lembaga peradilan yang dibentuk pemerintahan belanda sedangkan hukum adat digunakan di waktu-waktu tertentu seperti yang berkaitan dengan kehidupan sosial Masyarakat melayu jambi yang menyebabkan lemahnya hukum adat pada hukum belanda.

Dalam sistem keresidenan belanda mendirikan lembaga-lembaga yang mengurus permasalahan yang terjadi antara golongan belanda maupun lokal tetapi terdapat perilaku perbedaan terhadap perilaku hukum yang dilakukan pemerintah belanda terhadap golongan Masyarakat yang menciptakan ketidakadilan yang terjadi pada Masyarakat melayu jambi dan pemerintahan belanda. Selain itu perubahan pada masa keresidenan dengan proses kodifikasi hukum yang terjadi yang dimana hukum yang pada kesultanan hukum masih bersifat lisan yang padat. Kodifikasi pada masa keresidenan bertujuan untuk menciptakan hukum yang pasti yang membuat hukum adat kehilangan akan norma adat menjadi hilang tergantikan oleh prinsip belanda.

Lalu pemerintah kolonial memperkenalkan mekanis hukum yang lebih teratur seperti pencatatan, prosedur pengadilan dan sistem pembuktian yang membuat perubahan dalam masyarakat memahami hukum tetapi hukum adat tidak hilang secara sepenuhnya dalam Masyarakat melayu jambi yang dimana Masyarakat masih menggunakan hukum adat dalam urusan keluarga, pernikahan, warisan dan hubungan sosial yang membuat Masyarakat menghadapi dua hukum secara bersamaan. Masa keresidenan juga berdampak kepada elit lokal

yang dimana para pemimpin adat tidak dapat bisa mengambil Keputusan pada masa keresidenan tidak seperti pada masa kesultanan yang dimana pada keresidenan para pemimpin hanya menjadi perantara atau penghubung antara pemerintah belanda terhadap kebijakan.

Dalam keresidenan hukum yang dibuat oleh belanda untuk mendukung perekonomian belanda dalam mengatur perekonomian di melayu jambi tetepi hukum ini banyak yang menolak akan kebijakan yang dibuat oleh belanda yang Masyarakat beranggapan bahwa kebijakan ini merugikan Masyarakat melayu jambi pada masa itu. Dari keresidenan ini dimbulnya strukstur sosial dengan golongan eropa yang memiliki status yang tinggi dalam struktuk sosial lalu diikuti dengan golongan timur seperti cina dan arab terakhir golongan pribumi yang menjadi golongan yang akhir dalam struktur sosialnya.

Perubahan Sistem Ekonomi Melayu Jambi Setelah Keresidenan

Perubahan dalam sitem ekonomi pada mas keresidenan pada tahun 1906 sangat menjadi dampak yang sangat jelas yang dimana pada masa kesultanan melayu jambi dan masuknya belanda mengalami perubhan yang sangat jelas. Pada masa kesultanan melayu jambi sistem ekoniomi Masyarakat sangat bersifat tradisional yang masih berfokus kepada pedagang yang hanya menenuhi kebutuhan kehidupan yag memiliki pola produksi relatif sederhana dan juga adanya tersaksi jual beli yang masih tradisional yang dilakukan secara lokal yang dilakukan dengan menggunakan Sungai Batanghari menjadi jalan utama dalam melakukan perdagangan. Namum terjaadi perubaahan pada tahun 1906 pemerintahan belanda menerapkan sitem ekonomi yang bersifat secara luas yang merubah sistem ekonomi yang dahulu tradisional menjadi ekomomi yang lebih global dengan melakukan kegiatan ekspor sumber daya yang ada di melayu jambi.

Dalam perubahan yang dilakukann Belanda dengan memeperkenalkan sistem perkebuanan yang membuat Masyarakat melayu menanam tanaman yang memiliki niai ekonomi yang tinggi yang mengakibatkan pola pereknomian Masyarakat yang sebelumnya masih tradisional menjadi lebih luas dengan melakukan ekspor. Lalu Belanda juga menerapkan pajak yang mengikat Masyarakat yangbg dilakukan sebagai kewajiban terhadap kebijakan belanda yang membuat sistem transaksi mengalaami perubahn yang dahulu menggunakan barter menjadi sistem uang dari perubahan ini menjadi salah satu bentuk perubahan dalam pola pikir dalam Masyarakat melayu pada masa itu.

Perubahan ekonomi pada masa keresidenan didukung dengan pembangunan-pembangunan yang mendukung perekonomian untuk memperlancar jalannya transaksi jual beli dan menjadi yang memperkuat dalam kekuasaan pemerintahan Belanda. Dalam sistem ekonomi keresidenan juga berkembangnya tenaga kerja yang dimana pada masa kesultanan Masyarakat melakukan dengan secara sistem tradisional tetapi setelah pemerintahan Belanda pada masa keresidenan melakukan sistem upah. Kemudian struktur sosial Masyarakat Jambi mengalami perubahan dengan adanya pedagang, buruh, dan elit yang membuat terjadinya jaringan budaya yang luas dan kompleks. Pada akhirnya sistem yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda menciptakan akan dinamika dalam sistem ekonomi dan juga membuat akan ketergantungan terhadap pemerintahan Belanda.

Adaptasi Dan Resistensi Masyarakat Melayu Jambi

Pada masa Keresidenan tahun 1906 perubahan sistem pemerintahan, hukum dan ekonomi pada masa pemerintahan Belanda mengalami pergantian dalam beberapa sistem yang membuat Masyarakat Jambi mengubah kebiasaan menjadi sesuai dengan perintah yang telah di atur oleh Belanda dengan menggunakan susunan struktur yang banyak menguntungkan pemerintahan Belanda yang membuat menimbulkan beragam akan resistensi yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup dapat dilihat sebagai tekanan yang dihadapi oleh Masyarakat Jambi dalam mempertahankan identitas sosial dan budaya.

Dalam aspek adaptasi masyarakat Jambi terjadi perubahan pada elit lokal banyak memilih berkerja kepada pemerintahan Belanda sebagai salah satu dalam mempertahankan posisi sosial pada masa Keresidenan pemerintah Belanda memanfaatkan struktur lokal sebagai kunci dalam kebijakan yang melibatkan kaum elit lokal dalam pengambilan pajak dan pengawasan wilayah. Elit lokal dalam pemerintahan Belanda hanya sebagai yang memberikan pengaruh terhadap Masyarakat tidak seperti pada masa kesultanan. Selain dalam ekonomi dan sosial adaptasi juga terjadi pada sistem sosial dan hukum yang dimana masyarakat Melayu Jambi sudah mengenal akan sistem hukum kolonial yang lebih padat dan formal meskipun masih menerapkan hukum tradisional dalam hukum adat yang menjadi budaya mereka. Munculnya dualisme hukum yang menyebabkan masyarakat Melayu Jambi mengabungkan budaya baru dengan budayanya mereka.

Namun, di balik proses adaptasi tersebut, muncul pula berbagai bentuk resistensi sebagai reaksi terhadap kebijakan kolonial yang dianggap merugikan. Resistensi masyarakat Melayu Jambi tidak selalu bersifat konfrontatif atau terbuka, tetapi sering kali dilakukan secara halus dan terselubung. Salah satu bentuk resistensi yang umum adalah mempertahankan praktik adat dalam kehidupan sehari-hari, meskipun pemerintah kolonial berusaha menggantinya dengan sistem baru. Dengan tetap menjalankan adat, masyarakat menunjukkan penolakan terhadap dominasi kolonial dalam ranah sosial dan budaya. Selain itu, resistensi juga dapat berupa penghindaran terhadap kewajiban ekonomi seperti pajak atau kerja paksa. Beberapa masyarakat memilih untuk mengurangi produksi atau berpindah ke daerah yang lebih terpencil untuk menghindari kontrol kolonial. Tindakan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki cara-cara tersendiri untuk menolak kebijakan yang dianggap tidak adil.

Di beberapa wilayah, resistensi juga muncul dalam bentuk perlawanan terbuka, meskipun dalam skala yang terbatas. Daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis sulit dijangkau oleh pemerintah kolonial, seperti pedalaman atau wilayah pegunungan, sering menjadi pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Perlawanan ini biasanya dipicu oleh kebijakan ekonomi yang merugikan, seperti monopoli perdagangan atau eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, faktor kultural juga berperan penting, di mana masyarakat yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai adat cenderung lebih menolak sistem kolonial. Resistensi ini menunjukkan bahwa dominasi kolonial tidak sepenuhnya diterima, dan selalu ada upaya untuk mempertahankan kedaulatan lokal.

Interaksi antara adaptasi dan resistensi ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat Melayu Jambi pada masa keresidenan. Adaptasi memungkinkan masyarakat untuk bertahan dalam sistem baru dan memanfaatkan peluang yang ada, sementara resistensi menjadi bentuk perlawanan terhadap dominasi yang berlebihan. Kedua proses ini tidak selalu bertentangan, melainkan sering kali berjalan secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, seseorang dapat bekerja dalam sistem kolonial tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan pribadinya. Hal ini menunjukkan bahwa identitas masyarakat tidak sepenuhnya ditentukan oleh sistem kolonial, tetapi juga oleh upaya mereka dalam mempertahankan tradisi.

Dalam jangka panjang, adaptasi dan resistensi masyarakat Melayu Jambi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan budaya di wilayah tersebut.

Adaptasi terhadap sistem kolonial memperkenalkan unsur-unsur modernisasi, seperti sistem administrasi, ekonomi uang, dan pendidikan, yang kemudian menjadi bagian dari perkembangan masyarakat di masa berikutnya. Sementara itu, resistensi membantu menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat dan identitas budaya Melayu, sehingga tidak sepenuhnya hilang akibat pengaruh kolonial. Kombinasi antara adaptasi dan resistensi ini menciptakan bentuk masyarakat yang unik, di mana unsur tradisional dan modern saling berinteraksi dan membentuk karakter sosial yang khas.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam pembahasan dalam artikel ini bahwa Dinamika sistem Sosial Politik di Jambi setelah berakhirnya Kesultanan Melayu Jambi Pada tahun 1906 Bahwa terjadinya perubahan yang sangat signifikan dalam berpa aspek dalam kehidupan Masyarakat Melayu Jambi yang dimana beralihnya sistem Kesultanan menjadi sistem keresidenan di bawah Pemerintahan Belanda bukan hanya mengubah struktur pemerintahan bahwa pemerinntahan Belanda bukab hanya mengubah struktur pererintahan dan juga membawa dampak yang sangat luas terhadap sistem kehidupan Masyarakat Melayu Jambi ada saat ini hinggga saat ini.

Dalam sistem politik terlihat dalam teralihnya kekuasaan yang dimana masa Kesultana menggunakan sistem Monarki Herediter yanga padat akan adat yangh tradisional setelah runtuhnya kesultanan pada tahun 1906 mengubah sistem politik menjadi keresidenan yang dibetuk pemerintah Belanda. Sedangkan sistem hukum yang pada awalnya masih dasar akan tradisional lalu dengan munculnya keresidenan dengan adanya dualisme yang menimbulkan ketidak kesetaraan antara Belanda dan Masyarakat Melayu Jambi. Lalu dalam bidang ekonomi terjadi perubahan yang mendalam yang dimana pada masa pemerintahana lebih memilih keuntungan Belanda dengan memberikan kebijakan dengan mengenalkan tentang cara menanam, pajak dan juga perubahan dari tradisioanl.

Adaptasi yang terjadi akibat akan perubahan yang menunjukan bahwa Masyarakat Melayu Jambi melakukan adaptasi dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dilakukan pemerintahan Belanda. Dalm melakukan adaptasi terjadi resistensi yang terjadi pada Masyarakat Melayu Jambi dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh Masyarakat Melayu Jambi dalam mempertahankan identitas sosial dan budaya dan budaya yang telah lama mereka anut dan dipertahankan. Kemudian dinamika sistem sosial politik di Jambi setelah 1906

menjadi hasil bahwa terjadi interaksi Masyarakat dengan Belanda yang mengubah sifat dalam berapa sistem sosial politik yang ada di Melayu Jambi setelah kesultanan dengan digantikan menjadi Keresidenan pada tahun 1906.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyas, dkk. (2022). Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda. *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1).
- Astuti, dkk. (2024). Kesultanan Melayu Jambi pada abad ke-19: Dinamika ekonomi, politik, dan interaksi dengan kolonial Belanda. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(11), 399–404.
- Harefa, Rio, dkk. (2024). Melayu Jambi di bawah kolonialisme Belanda dan pengaruhnya kepada politik dan sosial. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(12). eISSN: 2118-7302.
- Herawaty, dkk. (2023). Perkembangan Kota Tua Modern Jambi di bawah Keresidenan Kolonial Belanda (1906–1942) sebagai bahan ajar SMA N 1 Muaro Jambi. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(3), Oktober 2023. eISSN: 2987-2731.
- Purnomo, dkk. (2024). Jambi masa kolonialisme dan imperialisme sebagai sumber pembelajaran sejarah: Studi kasus kepemimpinan H. Ismail pada masyarakat Kerinci dalam perjuangan melawan Belanda (1903–1925). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13908>
- Seprina, R. (2021). Kajian perkembangan perekonomian Jambi masa Hindia-Belanda (1906–1942) sebagai bahan ajar pembelajaran sejarah berbasis lokal. *Jurnal EduSosial*, 1(1), 84–93.
- Sumarni, Neni. (n.d.). Sejarah Kesultanan Jambi menurut naskah “Ini Sajarah Kerajaan Jambi”. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Wulandari, dkk. (2022). Pemerintahan dan politik etis serta penerapannya di Jambi. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 2(2), 14–26. eISSN: 2797-9059.